BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah singkat Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Reformasi birokrasi Pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan polingan ditetapkannya PP 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan guna mendorong tercapainya visi dan misi di bidang aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Perda No.22 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.2 Stuktur Organisasi Pada Badan Kepegawaian Derah (BKD)

Stuktur organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Povinsi Jawa Barat terdiri dari :

a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
b) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub bagian kepegawaian dan umum
c) Bidang mutasi dan administrasi kepegawaian ,membawahkan:
    1. Sub bidang kepangkatan dan pensiun
    2. Sub bidang perpindahan dan administrasi kepegawaian
d) Bidang pengembangan karir,membawahkan :
    1. Sub bagian kompetensi dan kinerja
    2. Sub bagian penempatan dan jabatan
e) Bidang kesejahteraan dan disiplin ,membawahkan :
    1. Sub bidang kesejahteraan pegawai
    2. Sub bidang disiplin dan penghargaan

2.3 Deskripsi Jabatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut , Badan Kepegawaian Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah

b) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah

Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program ,pengelolaan keuangan kepegawaian , dan umum . Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan
2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan
3. Menyelenggarakan pengelolaan urusan perencanaan dan program, keuangan, kepegawaian dan umum
4. Sekretariat membawahkan :
    a. Sub bagian Perencanaan dan Program
    b. Sub bagian Keuangan
    c. Sub bagian Kepegawaian dan Umum

c) Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi mutasi dan administrasi kepegawaian . Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi tersebut, Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis mutasi dan administrasi kepegawaian
2. Penyelenggaraaan pengkajian bahan fasilitasi mutasi dan administrasi kepegawaian
3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang mutasi dan administrasi kepegawaian ,yang membawahi :
    a. Bidang Mutasi dan Administrasi
    b. Sub bidang Perpindahan dan Administrasi Kepegawaian

d) Bidang Pengembangan Karier

Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan karier PNS . Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut , Bidang Pengembangan Karier mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan karier
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan karier
3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang pengembangan karier
4. Bidang Pengembangan Karir membawahkan :
    a. Sub bidang Kompetensi dan Kinerja
    b. Sub bidang Penempatan Dalam Jabatan.

e) Bidang Kesejahteraan dan Disiplin

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesejahteraan dan disiplin. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahab kebijakan teknis kesejahteraan dan disiplin
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bidang kesejahteraan dan disiplin
3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang kesejahteraan dan disiplin :
    a. Sub bidang Kesejahteraan Pegawai
    b. Sub bidang Disiplin dan Penghargaan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas , Badan Kepegawaian Daerah dilengkapi dengan personil PNS dan tenaga Honorer sebanyak 156 orang .

2.4 Aspek Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

A. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Penerimaan Praja IPDN tahun 2008
2. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang merupakan bentuk penghargaan kepada para tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinyab kepada nusa dan bangsa
3. Penerimaan CPNS dari pelamar umum dimana didasarkan padam formasi kebutuhan pegawai pada lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat

B. Program Prestasi

1. Terselenggaranya rekrutmen CPNS dari pelamar umum dan tenaga honorer tanpa ada gejolak dari masyarakat
2. Terlaksananya peningkatan status CPNS menjadi PNS sebanyak 1446 orang dan pengambilan Sumpah dan Janji diikuti oleh 1446 orang
3. Pelaksanaan penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dalam rangka mengaplikasikan PP nomor 41 tahun 2007
4. Meningkatnya jaringan scholarship baik dalam negeri maupun luar negeri
5. Kenaikan pangkat tepat waktu
6. Dibukanya kelas khusus pendidikan D4 Akuntansi Pemerintahan Sedangkan kegiatan unggulan BKD yakni :
    1. Pemberian Uang pembinaan kepada 1160 pensiun
    2. Uji terap pengukuran kinerja
    3. Pengiriman PNS/CPNS eks tenaga honorer dalam pendidikan gelar ke Universitas baik dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur.